

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia, merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP adalah internal auditor yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional melalui kegiatan *assurance* dan *consultancy*. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut berarti BPKP mempunyai fungsi dan tugas-tugas pokok untuk melakukan pengawasan independen terhadap satuan kerja pemerintah. Objek pemeriksaan BPKP antara lain: semua Intansi Pemerintahan Pusat/Daerah,dan BUMN/BUMD yang mengelola uang negara.

Perusahaan daerah air minum (PDAM) sebagai salah satu unit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu objek pemeriksaan BPKP. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih dan memenuhi syarat kesehatan masyarakat yang diawasi dan dimonitor oleh aparatur eksekutif maupun legislatif daerah. Selain bertugas sebagai pelayan masyarakat dalam hal penyediaan jasa air minum, PDAM juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Mengingat cukup pentingnya tanggung jawab yang diemban, maka PDAM harus

bekerja secara profesional dan efisien dalam melaksanakan usahanya. Untuk dapat menjamin PDAM berlangsung dengan baik, maka manajemen perlu mengadakan evaluasi terhadap kinerjanya. Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah, BPKP dalam hal ini Deputi Bidang Akuntan Negara diminta untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap PDAM di seluruh Indonesia sesuai dengan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: KJ.04.07-Mn/43 tanggal 12 Januari 2018 perihal Evaluasi Kinerja BUMN dan BUMD Penyelenggara SPAM.

Evaluasi kinerja PDAM bertujuan untuk membantu manajemen PDAM dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien, efektif, memperbaiki dan meningkatkan kinerja, serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab. Dalam menilai kinerja PDAM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memerlukan perencanaan yang tepat dalam melakukan evaluasi kinerja, perencanaan evaluasi kinerja harus di buat secara matang untuk menunjang kesuksesan kinerja. Tahap perencanaan disusun untuk menghasilkan beberapa prosedur sebagai pedoman dalam pengevaluasian kinerja. Prosedur adalah langkah-langkah yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis maupun administratif untuk menjamin terselenggaranya kebijakan yang telah ditentukan. Dengan adanya prosedur memudahkan langkah kerja BPKP dalam mengevaluasi kinerja PDAM, dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti untuk mencapai tujuan pemeriksaan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam evaluasi kinerja PDAM. BPKP melakukan prosedur evaluasi kinerja pada PDAM,

berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum menjadi salah satu landasan pengukuran tingkat keberhasilan PDAM. Tingkat keberhasilan prosedur pelaksanaan evaluasi kinerja PDAM dapat diukur melalui penilaian terhadap kinerjanya. Penilaian kinerja ini merupakan hasil pengembangan yang disusun oleh tim BPPSPAM bekerjasama dengan BPKP, Perpamsi dan beberapa PDAM yang didasarkan pada 4 (empat) aspek kinerja yaitu: aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek sumber daya manusia. Masing-masing aspek dirinci ke dalam beberapa indikator penilaian dengan tujuan untuk lebih memberikan kecermatan dalam melakukan penilaian. Hasil penilai kinerja diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori kinerja, yaitu PDAM sehat, PDAM kurang sehat dan PDAM sakit. Dengan adanya prosedur pelaksanaan evaluasi kinerja pada PDAM bisa jadi tolak ukur tingkat keberhasilan pengelolaan PDAM agar kedepannya PDAM bisa meningkatkan kinerja dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dengan pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memfokuskan studi dengan melakukan kegiatan magang pada kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat dengan mengangkat judul **"Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pada PDAM oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat"**.